
Diplomasi Indonesia dalam Konflik Irian Barat: Strategi di Balik Perundingan New York 1962

^{1*}Muhamad Khoerul Mahfud

¹Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Correspondence Author: mahfud7595@students.unnes.ac.id

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran diplomasi Indonesia dalam penyelesaian konflik Irian Barat dengan Belanda, khususnya terkait strategi yang digunakan dalam Perundingan New York 1962. Dengan berfokus pada pendekatan diplomatik Indonesia, penelitian ini mengkaji bagaimana Indonesia menggalang dukungan internasional dan memenangkan perundingan yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dengan jurnal ilmiah dan buku-buku terkait sebagai sumber utama. Temuan penelitian ini menunjukkan efektivitas strategi diplomatik Indonesia dalam memanfaatkan dinamika geopolitik global dan membentuk aliansi yang menguntungkan, sehingga memungkinkan Indonesia mencapai tujuannya tanpa harus melakukan intervensi militer skala besar.

Kata kunci: Diplomasi Indonesia, Konflik Irian Barat, Perundingan New York, 1962, Strategi.

Abstrak: This study aims to examine the role of Indonesian diplomacy in resolving the West Irian conflict with the Netherlands, especially related to the strategy used in the 1962 New York Negotiations. By focusing on Indonesia's diplomatic approach, this study examines how Indonesia rallied international support and won the negotiations mediated by the United States. The research method used is a literature study, with scientific journals and related books as the main sources. The findings of this study show the effectiveness of Indonesia's diplomatic strategy in utilizing global geopolitical dynamics and forming profitable alliances, allowing Indonesia to achieve its goals without having to carry out large-scale military intervention.

Keywords: Indonesian Diplomacy, West Irian Conflict, New York Negotiations, 1962, Strategy.

PENDAHULUAN

Salah satu insiden penting yang berubah menjadi inti kebijakan luar negeri Indonesia setelah kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1945 adalah konflik di Irian Barat (sekarang Papua). Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, Belanda tetap memerintah provinsi ini. Kenyataannya, Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia selama Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 meskipun tidak terkait atau tidak dengan provinsi Irian Barat. Belanda berpendapat bahwa Papua tidak boleh menjadi bagian dari Republik Indonesia karena perbedaan etnis dan budayanya yang substansial dari bagian lain negara itu karena penduduk asli Melanesia. Irian Barat dipandang oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari perjuangan negara untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Secara geografis dan historis, Indonesia menganggap Irian Barat sebagai bagian dari nusantara. Setelah

pengakuan internasional Indonesia sebagai negara berdaulat, Presiden Sukarno menjadikan integrasi Irian Barat sebagai tujuan politik, diplomatik, dan militer utama. Selain menjadi masalah dalam negeri, masalah Irian Barat melibatkan kekuatan politik global, khususnya dalam konteks Perang Dingin (Yumetri Abidin, 2019).

Indonesia telah terlibat dalam sejumlah inisiatif diplomatik untuk mempertahankan Irian Barat di luar negeri sejak awal 1950-an. Namun karena diplomasi tidak selalu berhasil, Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961 mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikor), seruan nasional untuk mobilisasi bersenjata jika Belanda menolak menyerahkan Irian Barat (Kurnia & Miftahuddin, 2019). Meskipun Trikor mengklaim adanya konfrontasi militer, diplomasi internasional pada akhirnya merupakan cara utama untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Irian Barat diberikan kepada Indonesia melalui sistem PBB sebagai hasil dari Negosiasi New York tahun 1962, yang dimediasi

oleh AS dan berfungsi sebagai cara untuk mengakhiri konflik. Penelitian sebelumnya telah menelaah beberapa aspek konflik di Irian Barat. Salah satunya Leirissa (1992), menjelaskan bagaimana Indonesia mulai mengembangkan strategi diplomatiknya pada saat yang sama ketika Belanda terus berusaha mempertahankan kendali atas Irian Barat setelah Konferensi Meja Bundar. Buku Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya, secara khusus menyebutkan kepentingan politik, ekonomi, dan kolonial Belanda yang mendorong perjuangan ini. Dalam hal ini, ketidakpuasan Indonesia terhadap hasil upaya diplomatiknya menyebabkan dilancarkannya Trikora.

Dalam Sejarah Indonesia Modern, Ricklefs menyoroti dukungan ekonomi dan militer Uni Soviet terhadap Indonesia selama masa ini. Uni Soviet melakukan hal ini khususnya setelah operasi militer di Trikora, yang menarik perhatian AS merasa khawatir bahwa Indonesia akan sepenuhnya berada di bawah kendali blok Soviet. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa AS memutuskan untuk menengahi Negosiasi New York, karena AS, di bawah Presiden John F. Kennedy berusaha mencegah eskalasi lebih lanjut dari konflik ini, baik melalui perang maupun pengaruh komunis yang semakin besar di Indonesia (Ricklefs, 2008). Tulisan-tulisan tambahan oleh penulis seperti McMullen (1981), dalam *Mediation of the West New Guinea Dispute* mengakui bahwa mediasi AS memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik secara damai. Menurut McMullen, negosiasi yang baik akhirnya menghasilkan resolusi, meskipun ada ancaman nyata dari militer Indonesia dan bantuan Soviet. Ellsworth Bunker dan duta besar AS lainnya berperan penting dalam menyelesaikan perselisihan antara kepentingan Belanda dan Indonesia.

Studi ini memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang strategi diplomatik Indonesia dalam Negosiasi New York dalam konteks literatur. Latar belakang internasional dari konflik ini telah dibahas dalam banyak publikasi, tetapi masih belum banyak yang berkonsentrasi pada strategi khusus yang digunakan Indonesia untuk mendapatkan bantuan dari negara lain, khususnya melalui mediasi AS. Selama Perang Dingin, ketika AS dan Uni Soviet merupakan dua blok utama

dunia yang bersaing untuk menguasai negara-negara berkembang, terjadi ketegangan di sekitar konflik Irian Barat. Diplomasi Indonesia terpengaruh oleh keadaan ini, terutama karena Sukarno terampil menggunakan dinamika global ini untuk memajukan tujuan negaranya. Meskipun berupaya mempertahankan peran kepemimpinannya dalam Gerakan Non-Blok, Indonesia tetap menjaga hubungan positif dengan kedua blok tersebut. Karena merupakan negara komunis, Uni Soviet secara langsung mendukung Indonesia dengan mempersenjatai angkatan bersenjata di Trikora. Menurut sebuah studi oleh Indrayani et al. (2020), motivasi Uni Soviet untuk dukungan ini melampaui ideologi dan mencakup tujuan Soviet untuk mengurangi pengaruh AS di Asia Tenggara. Dalam upaya untuk membujuk Sukarno agar mendukung tujuan komunis di wilayah tersebut, Uni Soviet mengirimkan bantuan militer kepada Indonesia. Akan tetapi, Amerika Serikat mulai memahami bahwa Indonesia sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan Asia-Pasifik.

Amerika Serikat menyatakan kekhawatiran bahwa pengaruh Barat di Asia Tenggara akan terancam jika Indonesia sepenuhnya berpihak pada blok komunis. Setelah pelantikannya, Presiden Kennedy berupaya untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia dan menghindari konfrontasi militer yang akan memperburuk situasi. AS memediasi Negosiasi New York untuk membawa Indonesia dan Belanda ke dalam perjanjian damai melalui duta besar Ellsworth Bunker. Titik balik penting dalam sejarah diplomatik Indonesia terjadi selama perundingan tahun 1962 di New York. Sebuah kesepakatan dicapai selama perundingan, yang disaksikan oleh para duta besar dari AS, Belanda, dan Indonesia, yang menyatakan bahwa Irian Barat akan diberikan kepada PBB melalui Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) sebelum diberikan kepada Indonesia secara resmi. Pendekatan diplomatik Indonesia dalam perundingan ini sebagian besar bergantung pada kapasitasnya untuk mendapatkan dukungan internasional. Anggota Gerakan Non-Blok, yang melihat pertempuran Indonesia sebagai bagian dari kampanye global melawan kolonialisme, memberikan dukungan kepada Indonesia.

Negara-negara blok Timur, seperti Cina dan Uni Soviet, juga mendukung Indonesia pada saat yang sama karena mereka percaya bahwa menyelesaikan masalah tersebut akan mengurangi pengaruh Barat di wilayah tersebut (Wardaya, 2008).

Meskipun awalnya mendukung Belanda, Amerika Serikat akhirnya memilih untuk menengahi pertikaian tersebut karena khawatir jika Indonesia semakin dekat dengan Uni Soviet, situasi di Asia Tenggara akan semakin buruk. Kennedy menyadari bahwa stabilitas regional lebih penting daripada menjaga hubungan dengan Belanda. AS berhasil meyakinkan Belanda untuk menerima mekanisme PBB sebagai resolusi damai atas krisis tersebut selama negosiasi yang berlangsung di New York. Selain memberikan pidato motivasi, Presiden Sukarno berperan penting dalam diplomasi ini karena penilaian politiknya yang cerdas dalam menangani urusan luar negeri. Sukarno menggalang dukungan untuk Indonesia secara internasional dengan menggunakan retorika anti-imperialis. Ia menggarisbawahi berkali-kali bahwa perjuangan Indonesia untuk menaklukkan Irian Barat merupakan komponen dari gerakan dunia melawan kolonialisme. Selain itu, Sukarno adalah seorang ahli dalam memainkan dinamika politik internasional, dengan dukungan Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur, ia memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi internasional sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat melalui diplomasi pragmatis. Sukarno mampu memberikan tekanan kepada Amerika Serikat untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menyelesaikan konflik tersebut (Alam, n.d.).

Irian Barat akan diserahkan kepada UNTEA pada tanggal 1 Oktober 1962, dan selanjutnya kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembahasan yang berakhir di New York. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969, yang secara resmi mengakui penggabungan Papua ke dalam Indonesia, muncul setelah perjanjian ini. PBB mengakui hasil-hasil proses PEPERA, meskipun ada kritik bahwa proses tersebut tidak mencerminkan keinginan rakyat Papua secara memadai, dan Irian Barat diterima sebagai bagian resmi dari

Republik Indonesia. Indonesia telah menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan sistem internasional guna mencapai tujuan politiknya, seperti yang terlihat dari upaya diplomatiknya untuk menyelesaikan masalah ini. Negosiasi di New York memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor di antara negara-negara berkembang dan merupakan kemenangan diplomatik yang signifikan bagi Indonesia. Kemenangan diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan krisis Irian Barat, khususnya selama Perundingan New York tahun 1962, membuktikan kebenaran pendekatan yang diambil dalam berinteraksi dengan Belanda dan mendapatkan dukungan global. Pada saat itu, ketegangan yang berasal dari Perang Dingin dan ambisi negara-negara kuat seperti AS dan Uni Soviet memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan momentum yang sedang dibangun di seluruh dunia. Diplomasi Indonesia dalam hal ini tidak hanya mencakup diskusi bilateral dengan Belanda tetapi juga diplomasi multilateral melalui PBB dan hubungan dengan negara-negara nonblok (Rieuwpassa, 2017).

Secara khusus, Presiden Sukarno memiliki pengaruh besar dalam mengembangkan pendekatan diplomatik ini. Ia menghimpun empati dan dukungan negara-negara berkembang khususnya negara Gerakan Non-Blok dengan menggunakan bahasa anti kolonial yang tegas. Akan tetapi, bantuan persenjataan Uni Soviet dan bahaya militer yang ditimbulkan oleh Trikora memberikan tekanan pada Belanda dan negara-negara Barat lainnya, menjadikan mediasi AS sebagai cara yang paling efektif untuk menghentikan konflik agar tidak semakin memburuk. Keberhasilan diplomasi Indonesia selama Negosiasi New York dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk membentuk koalisi internasional yang kuat dan menggabungkan negosiasi diplomatik dengan paksaan militer. Perundingan New York dan PEPERA 1969, yang menyelesaikan sengketa Irian Barat berdampak besar pada politik dalam negeri dan prestise internasional Indonesia. Di negara ini, pemerintahan Sukarno dianggap menang dalam perjuangannya untuk integritas teritorial dan kedaulatan nasional sebagai hasil dari kemenangan ini, yang memperkuat legitimasinya. Pengalihan Irian Barat ke

Indonesia dipandang sebagai kemenangan diplomatik bagi negara dan memainkan peran penting dalam narasi nasionalis yang dikembangkan oleh pemerintahan tersebut.

Dengan dukungan dari banyak negara, Indonesia semakin dipandang sebagai pemain utama dalam politik dunia, khususnya dalam konteks perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Penyelesaian konflik ini secara damai juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu menggunakan diplomasi sebagai alat utama dalam mencapai tujuan politiknya di panggung internasional. Di kancah internasional, resolusi ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara terkemuka di Asia Tenggara dan Gerakan Non-Blok. Namun, dampak jangka panjang dari penggabungan Papua ke Indonesia masih menjadi perdebatan. Ada pertentangan mengenai apakah proses PEPERA secara akurat mewakili keinginan rakyat Papua, dan pertentangan ini terus berlanjut hingga hari ini. Akan tetapi, pencapaian PEPERA dan Perundingan New York masih dianggap sebagai salah satu titik balik utama dalam sejarah kebijakan luar negeri Indonesia dari sudut pandang diplomatik.

Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia menggunakan kombinasi cerdas antara diplomasi diplomatik, dukungan internasional, dan tekanan militer untuk menyelesaikan konflik Irian Barat melalui Negosiasi New York 1962. Kemampuan negara untuk memanfaatkan dinamika global demi kepentingannya sendiri ditunjukkan oleh kemampuannya untuk mengamankan perjanjian damai dengan Belanda dan memastikan integrasi Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia, bahkan dalam menghadapi kritik lokal terhadap proses penyelesaiannya. Meskipun demikian, diplomasi Indonesia dalam konflik ini terus menjadi salah satu studi kasus utama dalam sejarah diplomasi internasional, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang yang memerangi kolonialisme.presentation..

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis strategi diplomasi

Indonesia dalam Perundingan New York 1962. Penelitian ini menekankan penggunaan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademis, termasuk buku dan artikel jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis dan arsip digital yang berkaitan dengan diplomasi Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat selama perundingan tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, di mana peneliti mengidentifikasi strategi diplomasi yang diterapkan oleh Indonesia dan peran negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam proses mediasi. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dari berbagai sumber. Penelitian ini juga menggunakan teori hubungan internasional, khususnya teori negosiasi dan mediasi dalam konflik internasional, untuk mengevaluasi efektivitas strategi diplomasi Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana Indonesia berhasil memanfaatkan dinamika Perang Dingin dan aliansi strategisnya dalam menyelesaikan konflik Irian Barat melalui Perundingan New York 1962.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diplomasi Indonesia

Secara umum, diplomasi adalah seni dan praktik mengadakan diskusi antara perwakilan negara untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan atau menyelesaikan perselisihan secara damai. Diplomasi adalah alat penting dalam kebijakan luar negeri negara mana pun, terutama ketika menangani masalah dalam hubungan internasional. Dalam konteks Indonesia, diplomasi adalah alat utama yang digunakan dalam perjuangan untuk membawa wilayah yang secara strategis dan budaya penting di bawah payung negara Indonesia. Tahun 1949-1962, diplomasi Indonesia difokuskan pada Irian Barat, yang tetap berada di bawah kedaulatan Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. Selain berfokus pada penyatuan kawasan secara damai, upaya diplomatik Indonesia untuk menyelesaikan masalah Irian Barat mencakup

ancaman penggunaan kekuatan bersenjata sebagai jalan terakhir jika jalur diplomatik tidak membuahkan hasil. Diplomasi ini melibatkan pertemuan bilateral dengan Belanda, berbagai upaya negosiasi melalui forum internasional seperti PBB, dan upaya untuk menarik negara-negara sahabat, khususnya negara-negara di Asia dan Afrika yang memiliki sejarah dan pengalaman kolonial yang sama (Marshanda, 2023).

Salah satu topik terpenting dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 adalah sengketa Irian Barat. Wilayah Irian Barat dikecualikan dari wilayah yang diakui Belanda sebagai milik Republik Indonesia, berdasarkan hasil Perjanjian Linggarjati dan Renville. Indonesia, yang percaya bahwa seluruh wilayah bekas Hindia Belanda harus menjadi bagian dari negara yang baru merdeka, kecewa dan tidak puas dengan posisi ini. Susetyo (2018), menegaskan bahwa Belanda tetap memegang kedaulatan atas Irian Barat dan bermaksud menyiapkan wilayah tersebut untuk kemerdekaan pada akhirnya sebagai negara terpisah di bawah pengaruh Belanda. Hal ini sangat kontras dengan keyakinan Indonesia bahwa Irian Barat merupakan bagian integral dari Republik Indonesia. Perselisihan ini kemudian menyebabkan konflik berkepanjangan yang melibatkan tidak hanya Belanda dan Indonesia tetapi juga negara-negara kuat lainnya termasuk AS dan Uni Soviet.

Diplomasi digunakan dalam upaya awal Indonesia untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat. Membawa masalah ini ke hadapan Majelis Umum PBB pada tahun 1954-1957 merupakan salah satu langkah penting yang diambil. Selama pertemuan-pertemuan tersebut, Indonesia berusaha meyakinkan anggota PBB bahwa penyelesaian konflik Irian Barat merupakan langkah yang diperlukan menuju kemerdekaan dan memerlukan dukungan dari masyarakat internasional. Sayangnya, Belanda tetap bersikeras mempertahankan Irian Barat, dan negara-negara Barat cenderung mendukung sikap Belanda, oleh karena itu upaya-upaya ini

tidak membuahkan hasil yang positif (Susetyo & Ravico, 2020).

Pendekatan pertama Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Irian Barat adalah diplomasi terbuka, atau diplomasi transparan yang dilakukan di forum-forum internasional seperti PBB dan Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung. Indonesia secara terbuka menyatakan di tempat-tempat tersebut bahwa Indonesia ingin menggabungkan Irian Barat dengan wilayah lain yang sudah berada di bawah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemimpin delegasi Indonesia dan perdana menteri saat itu Ali Sastroamidjojo, berperan penting dalam mengangkat isu Irian Barat ke perhatian masyarakat dunia. Bersama diplomat lain seperti Soebandrio dan Sunario, Ali berupaya untuk menarik perhatian negara-negara lain, terutama yang pernah mengalami penjajahan dengan cara yang sama. Menurut Widjojo et al. (2010), kedudukan Indonesia di mata masyarakat internasional sangat diperkuat oleh dukungan negara-negara Asia dan Afrika, yang sebagian besar memiliki sejarah perlawanan terhadap penjajahan.

Titik balik yang krusial terjadi pada tahun 1955 ketika negara-negara Asia Afrika menegaskan dukungan mereka terhadap klaim Indonesia atas Irian Barat pada Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dalam pertemuan ini, Indonesia berhasil menggalang partisipasi negara-negara peserta untuk menyatakan bahwa masalah Irian Barat merupakan bagian dari dekolonisasi dan harus segera diselesaikan. Namun, tekanan ini tidak cukup untuk memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat, meskipun berhasil mengumpulkan dukungan moral dan politik (Marshanda, 2023). Setelah gagalnya diplomasi terbuka, Indonesia mengambil sikap konfrontatif. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa upaya diplomatik untuk mengubah pola pikir Belanda telah gagal, sehingga memutuskan untuk mengambil sikap keras terhadap Belanda dengan kebijakannya. Kemudian, pada tanggal 19 Desember 1961, di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikor), yang mendesak rakyat Indonesia untuk menguasai Irian Barat dengan kekerasan jika perlu.

Tiga arahan utama Trikor adalah: (1) mencegah berdirinya negara boneka Belanda di

Papua; (2) mengibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat; dan (3) mengorganisasi gerakan massa untuk melindungi kemerdekaan dan persatuan negara. Pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto, sebagai tanggapan terhadap Trikora. Perencanaan dan pelaksanaan tindakan militer yang diperlukan untuk merebut Irian Barat dari Belanda berada di bawah komando ini (Mangkusubroto, 2023). Pengerahan pasukan dalam skala besar, latihan militer, dan infiltrasi ke wilayah Irian Barat merupakan bagian dari operasi militer ini. Sebagaimana dicatat Marshanda (2023), meskipun hasil dari kebijakan konfrontasi ini tidak langsung terlihat, kebijakan ini menunjukkan tekad Indonesia untuk mempertahankan klaimnya atas Irian Barat dan menyebabkan Belanda mengevaluasi kembali pendiriannya. Negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, mempertimbangkan konfrontasi militer secara serius karena mereka khawatir hal itu akan berubah menjadi konflik global yang melibatkan blok-blok kekuatan besar.

Karena kebijakan konfrontasi tampaknya menemui jalan buntu, Indonesia menggunakan diplomasi, meskipun lebih tertutup dan rahasia. Perundingan rahasia yang difasilitasi oleh diplomat AS dan Sekretaris Jenderal PBB digunakan untuk melakukan diplomasi tertutup. Pada saat itu, untuk mencegah kemungkinan pecahnya perang antara Indonesia dan Belanda, perhatian seluruh dunia mulai terpusat pada penyelesaian damai masalah Irian Barat. Prakarsa Bunker, sebuah rencana perdamaian yang diajukan oleh Duta Besar AS Elsworth Bunker, menyediakan sarana penyelesaian konflik dengan cara yang memuaskan kedua belah pihak. Sejalan dengan upaya ini, Belanda setuju untuk menyerahkan Irian Barat kepada Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) sebelum Indonesia menerima kendali resmi atas wilayah tersebut (Saltford, 2003).

Diplomasi tertutup ini berpuncak pada penandatanganan Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962, yang menetapkan bahwa mulai tanggal 1 Oktober 1962 dan seterusnya UNTEA akan mengambil alih administrasi Irian Barat dari Belanda, dengan

Irian Barat secara resmi menjadi wilayah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Setelah itu, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) akan dilakukan pada tahun 1969 untuk menentukan apakah orang Papua ingin tetap merdeka atau menjadi bagian dari Indonesia, meskipun proses Pepera kemudian dianggap kontroversial dan tidak secara akurat mewakili aspirasi orang Papua, namun hal itu tetap menandai berakhirnya konflik antara Indonesia dan Belanda atas Irian Barat. Penyelesaian konflik Irian Barat melibatkan negara-negara besar termasuk Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada awalnya, Amerika Serikat lebih suka berpihak pada Belanda namun karena pengaruh komunis yang semakin besar di Indonesia dan kekhawatiran bahwa konflik tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan di Asia Tenggara, Amerika Serikat mengubah posisinya. Amerika Serikat memulai upaya untuk memediasi negosiasi antara Indonesia dan Belanda melalui diplomat Elsworth Bunker. Namun, karena menganggap Indonesia sebagai sekutu strategis di kawasan tersebut, Uni Soviet cenderung mendukung posisi Indonesia (Saltford, 2003).

Ketakutan akan dominasi komunis di Indonesia membuat Amerika Serikat, yang sebelumnya mendukung Belanda, mengubah pendekatannya. Amerika terdorong oleh keadaan ini untuk mencapai keseimbangan dalam kebijakan luar negerinya guna mempertahankan Indonesia sebagai sekutu utama di kawasan Asia Tenggara. Seiring meningkatnya permusuhan antara Indonesia dan Belanda, AS khawatir bahwa konflik skala penuh dapat pecah di kawasan tersebut, yang menciptakan situasi yang dapat dimanfaatkan oleh Uni Soviet untuk memperkuat posisinya di Asia Tenggara. Elsworth Bunker mewakili Amerika Serikat memulai proses mediasi, yang menghasilkan penandatanganan Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Dengan penandatanganan perjanjian ini, Belanda setuju untuk menyerahkan kendali Irian Barat kepada Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA), sebuah badan PBB yang akan berfungsi sebagai badan transisi hingga Indonesia mengambil alih wilayah tersebut pada tahun 1963. Menurut Saltford (2003), salah satu contoh intervensi PBB yang berhasil menyelesaikan krisis kolonial di era

pasca-Perang Dunia II adalah peran UNTEA dalam pengalihan kekuasaan di Irian Barat.

Dalam proses ini, Amerika Serikat tidak hanya bertindak sebagai mediator tetapi juga sebagai analis situasi untuk memahami konflik yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Belanda. Hal ini terjadi karena kekhawatiran akan dominasi Soviet di Indonesia jika konflik tidak segera diselesaikan. Melalui Prakarsa Bunker, Amerika Serikat mengurangi peran kunci dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Nantinya, penyelesaian ini dapat diselesaikan tanpa memerlukan kekuatan militer yang lebih kuat (Susetyo & Ravico, 2020). PBB, sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan dunia, juga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa Irian Barat. Dengan melibatkan UNTEA, PBB bertindak sebagai penjamin pelaksanaan Persetujuan New York dan memastikan bahwa proses peralihan kekuasaan dari Belanda kepada Indonesia berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Meskipun begitu, peran PBB dalam pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 masih menjadi perdebatan hingga kini. Beberapa pihak menilai bahwa PBB tidak sepenuhnya netral dalam memastikan bahwa Pepera dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, mengingat hasilnya yang kontroversial (Saltford, 2003).

Penyelesaian konflik Irian Barat melalui diplomasi Indonesia memiliki dampak penting pada hubungan Indonesia dan Belanda serta kedudukan Indonesia di mata internasional. Pencapaian ini memperkuat kedudukan Soekarno sebagai pemimpin yang dapat menegakkan kedaulatan nasional dan menyatukan seluruh bekas Hindia Belanda ke dalam Republik Indonesia dari sudut pandang politik dalam negeri. Hasil dari konflik ini meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara yang mampu menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur diplomatik dalam kerangka hubungan internasional. Capaian ini juga menunjukkan kapasitas Indonesia untuk menggalang dukungan dari seluruh dunia, terutama dari negara-negara berkembang yang memiliki sejarah perlawanan terhadap kolonialisme yang serupa. Menurut Marshanda (2023), negara-negara Asia Afrika yang saat ini

tengah berjuang untuk melepaskan diri dari kolonialisme dapat belajar dari capaian diplomatik Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Irian Barat.

Di sisi lain terlepas dari pencapaian ini, beberapa pihak mengkritik pelaksanaan proses tersebut, menyebutnya tidak demokratis karena mengandalkan para pemimpin masyarakat terpilih untuk musyawarah daripada melibatkan semua warga Papua untuk memberikan suara secara langsung. Hal ini menimbulkan keraguan tentang legitimasi proses tersebut dan telah menimbulkan ketidakpuasan di antara sebagian warga Papua bahkan hingga hari ini (Saltford, 2003). Cara Indonesia menggunakan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat merupakan salah satu contoh bagaimana negara ini dapat menggunakan jalur diplomatik untuk memperjuangkan kepentingannya. Prakarsa yang diambil oleh para diplomat Indonesia menunjukkan kemampuan beradaptasi dan kapasitas diplomasi Indonesia dalam menangani isu-isu terkini, baik melalui jalur terbuka di forum internasional maupun jalur tertutup melalui negosiasi rahasia. Diplomat Indonesia seperti Ali Sastroamidjojo, Soebandrio, dan Sunario memainkan peran penting dalam mengorganisasi dukungan dari seluruh dunia dan merumuskan rencana diplomatik yang berhasil. Selain menunjukkan komitmen Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya, kebijakan konfrontasi Soekarno melalui Trikora meningkatkan tekanan pada Belanda untuk menemukan solusi diplomatik atas konflik tersebut.

Meski sempat menuai kritik atas pelaksanaan Pepera, namun capaian ini tetap menjadi kemenangan diplomasi Indonesia yang patut diapresiasi. Keberhasilan penyelesaian sengketa Irian Barat melalui Perjanjian New York juga tidak lepas dari peran negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang berperan penting dalam memediasi konflik ini. Pada tahun 1963, setelah melalui proses diplomatik yang berlarut-larut dan sulit, Irian Barat berhasil dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Diplomasi Indonesia dalam kasus Irian Barat menunjukkan bahwa, dengan pendekatan yang tepat, diplomasi dapat menjadi cara yang berhasil untuk menyelesaikan pertikaian

internasional dan mencapai tujuan nasional tanpa melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata secara langsung.

B. Konflik Irian Barat

Konflik Irian Barat merupakan perselisihan antara Indonesia dan Belanda mengenai status kedaulatan wilayah Irian Barat yang sekarang dikenal sebagai Papua. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, meskipun Belanda tetap menguasai Irian Barat. Ketegangan yang terjadi akibat konflik ini berlangsung selama beberapa dekade. Selain menjadi perselisihan antara dua negara, perang ini juga berdampak pada negara lain, termasuk AS dan Uni Soviet, terutama mengingat Perang Dingin yang sedang berkecamuk saat itu (Husin, 2022). Pada akhirnya, sejumlah inisiatif diplomatik, seperti Perjanjian New York tahun 1962, yang mempertemukan berbagai pihak terkait untuk menemukan solusi damai, digunakan untuk mengatasi masalah ini. Kolonisasi Belanda di Indonesia merupakan asal mula konflik Irian Barat. Mereka berupaya mempertahankan Irian Barat sebagai bagian dari kekaisaran kolonial mereka setelah kerajaan Jepang dan kembalinya Belanda ke Indonesia pada akhir Perang Dunia II. Karena populasi Melanesia di Irian Barat berbeda secara etnis dan budaya dari mayoritas Melayu di Indonesia, Belanda memandang wilayah tersebut sebagai entitas yang berbeda. Kesulitan yang signifikan muncul dari hal ini, karena Indonesia berpendapat bahwa Republik Indonesia yang baru merdeka harus mencakup semua bekas Hindia Belanda, termasuk Irian Barat (Juliarni & Zed, 2020).

Belanda berjanji untuk mengadakan perundingan lebih lanjut mengenai masa depan wilayah tersebut, tetapi mereka enggan menyerahkan Irian Barat karena melihat potensi ekonomi dari sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk kekayaan mineral seperti emas dan tembaga yang kemudian akan dieksploitasi oleh perusahaan Freeport (Marshanda, 2023). Pada tahun 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia atas sebagian besar wilayah Hindia Belanda dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB), namun status Irian Barat tidak kunjung

terselesaikan. Irian Barat memiliki arti penting secara simbolis dan strategis bagi Indonesia. Secara simbolis, memperoleh kekuasaan atas Irian Barat merupakan langkah yang diperlukan untuk mencapai kemerdekaan penuh Indonesia. Presiden Soekarno menggarisbawahi bahwa Republik Indonesia harus memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah yang pernah menjadi bagian dari Hindia Belanda, termasuk Irian Barat. Teori "Republik Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat," yang didasarkan pada gagasan bahwa kedaulatan atas Irian Barat merupakan syarat yang diperlukan bagi kemerdekaan Indonesia, mencakup sudut pandang ini (Husin, 2022). Lebih jauh, wilayah Irian Barat memiliki arti penting yang strategis bagi Indonesia karena kedekatannya dengan Papua Nugini dan pulau-pulau Pasifik lainnya, yang dapat berfungsi sebagai saluran bagi pengaruh Indonesia di wilayah tersebut.

Sementara itu, Irian Barat merupakan wilayah kolonial terakhir di bawah kekuasaan Hindia Belanda yang masih berada di bawah kedaulatan Belanda. Wilayah ini memiliki kepentingan strategis bagi Belanda untuk mempertahankan kehadirannya di Asia Tenggara, selain potensi ekonominya. Lebih jauh, penduduk asli Melanesia di Irian Barat dipandang oleh Belanda sebagai kelompok etnis tersendiri yang membutuhkan perlindungan terhadap supremasi kelompok etnis Jawa dan Melayu di Indonesia (Juliarni & Zed, 2020). Akibatnya, Belanda menolak menyerahkan negara ini, dengan alasan bahwa mereka memberdayakan penduduk asli untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dinamika Perang Dingin yang membentuk dunia saat itu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Perang Irian Barat. Di satu sisi, AS mulai terlibat dalam pertikaian ini karena khawatir dengan perkembangan komunisme di Asia Tenggara. Mereka melihat, jika pemerintahan Soekarno tidak bertindak cepat, posisi Indonesia yang semakin dekat dengan blok komunis dapat semakin memburuk. Sebaliknya, Indonesia mendapat dukungan militer dan politik dari Uni Soviet, yang membuat Soekarno yakin untuk menghadapi Belanda dengan lebih kuat (Wihardiyantie et al., 2018).

Ketika diplomasi gagal memberikan hasil yang memuaskan pada awal tahun 1960-an,

Indonesia mulai mempersiapkan langkah-langkah militer untuk menguasai Irian Barat. Presiden Soekarno menyatakan pada bulan Desember 1961 bahwa militer akan "membebaskan" Irian Barat jika diperlukan, dan dengan demikian memulai Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat). Dalam hal ini, tentara Indonesia, yang pada saat itu berusaha untuk mengimbangi otoritas militer Belanda yang mapan di daerah tersebut, menerima bantuan militer dari Uni Soviet dalam bentuk persenjataan dan pelatihan (Husin, 2022). Sementara itu, Amerika Serikat turun tangan sebagai mediator karena khawatir akan meningkatnya ketegangan di kawasan itu dan kemungkinan keterlibatan langsung Soviet. Ellsworth Bunker, diplomat Amerika, berperan penting dalam pengembangan "Rencana Bunker", yang menjadi dasar pembicaraan antara Belanda dan Indonesia. Strategi ini akhirnya membawa para pihak ke meja perundingan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pada tanggal 15 Agustus 1962, Perjanjian New York dicapai. Sesuai perjanjian tersebut, Irian Barat akan diperintah sementara oleh Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) hingga referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dilaksanakan pada tahun 1969, yang kemudian akan diserahkan kepada Indonesia (Wihardyantie et al., 2018).

Meskipun banyak rintangan yang menghadang, diplomasi sangat penting dalam mengakhiri konflik Irian Barat. Ketegangan antara Belanda dan Indonesia memuncak setelah Operasi Trikora dimulai. Sementara Indonesia meningkatkan persiapannya untuk invasi dengan bantuan Uni Soviet, Belanda mulai memperkuat angkatan bersenjata di Irian Barat. Meskipun demikian, bantuan mediasi Amerika Serikat menawarkan jalan bagi penyelesaian damai (Marshanda, 2023). Setelah perundingan panjang yang dipimpin oleh Ellsworth Bunker, akhirnya diputuskan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada PBB, meskipun ada perbedaan pendapat yang signifikan antara kedua belah pihak. Setelah itu, UNTEA bertanggung jawab untuk mengelola wilayah tersebut hingga referendum Pepera, yang memberikan pilihan kepada masyarakat Irian Barat untuk menjadi bagian dari Indonesia atau memisahkan diri untuk membentuk negara

sendiri berlangsung. Mayoritas pemilih Irian Barat mendukung bergabung dengan Indonesia dalam referendum 1969 meskipun demikian, prosedur ini bukannya tanpa kontroversi, terutama mengingat adanya tuduhan pemaksaan dan manipulasi hasil (Juliarni & Zed, 2020).

Meskipun perselisihan antara Indonesia dan Belanda tentang Irian Barat tampaknya telah diselesaikan dengan Perjanjian New York dan Act of Free Choice, penyerapan Papua ke dalam wilayah Indonesia memunculkan masalah baru. Sebagai akibat dari tuntutan hak-hak orang Papua sebagai akibat dari marginalisasi mereka di bawah kebijakan Jakarta, gerakan separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) lahir pada tahun 1965 (Harsono et al., 2023). Ketegangan tersebut bermula dari masalah-masalah yang masih ada hingga saat ini, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata, dan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing. Yang membuat masalah ini makin rumit, perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport, yang mulai berbisnis di Papua pada tahun 1967 hadir di sana. Masyarakat setempat sering kali merasa bahwa mereka tidak menerima bagian yang adil dari keuntungan eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka, meskipun perusahaan-perusahaan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia (Juliarni & Zed, 2020). Demonstrasi dan ketidakpuasan telah terjadi selama puluhan tahun akibat skenario ini, meskipun pemerintah Indonesia telah berupaya menyelesaikannya pada tahun 2001 dengan kebijakan Otonomi Khusus untuk Papua.

Salah satu periode penting dalam sejarah hubungan Indonesia-Belanda setelah kemerdekaan adalah konflik Irian Barat, yang diwarnai oleh pertukaran militer dan diplomasi yang panas yang dipengaruhi oleh geopolitik global era Perang Dingin. Perjuangan untuk menaklukkan Irian Barat merupakan bagian dari upaya Indonesia yang lebih besar untuk menuntaskan kemerdekaannya yang belum selesai. Bagi Belanda, mempertahankan wilayah ini merupakan upaya terakhir untuk melindungi sisa-sisa kerajaan kolonial mereka di Asia. Dominasi Belanda di Irian Barat berakhir dengan

Perjanjian New York dan referendum Pepera pada tahun 1969, namun berakhirnya perang ini juga menghadirkan kesulitan baru bagi pemerintahan pejabat di daerah tersebut. Namun, masalah Papua tidak berakhir di sana, dan masa depan provinsi tersebut di Indonesia terus menghadapi kendala yang signifikan. Setelah Papua dimasukkan ke dalam Indonesia, ketidakpuasan penduduk setempat terhadap pemerintah nasional memunculkan sejumlah konflik baru. Pemerintah pusat dan penduduk asli Papua berselisih pendapat mengenai tuduhan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan internasional seperti Freeport (Harsono et al., 2023). Gerakan oposisi seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus melakukan perlawanan, dan pertempuran ini terus berlanjut dalam berbagai bentuk selama beberapa dekade setelahnya.

Pemberian status Otonomi Khusus pada tahun 2001 merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk meredakan ketegangan di Papua. Berkat kebijakan ini, Pemerintah Daerah Papua kini memiliki kewenangan lebih besar untuk mengawasi masalah internal, seperti pelestarian sumber daya alam dan warisan budaya daerah. Banyak pihak menilai bahwa meskipun pendekatan ini mampu meredakan konflik untuk sementara, kesejahteraan masyarakat Papua tidak berubah secara signifikan akibat otonomi khusus. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah Papua masih berpusat pada hal ini (Juliarni & Zed, 2020). Pelanggaran hak asasi manusia, kesenjangan ekonomi, dan marginalisasi politik terus menjadi penyebab utama konflik Papua. Meskipun sebagian warga Papua percaya bahwa pembangunan tidak adil karena menguntungkan kepentingan Jakarta dan bisnis asing, dialog dan diplomasi tetap merupakan cara terbaik untuk mencapai jawaban untuk jangka panjang yang baik. Masalah terbesar yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menyeimbangkan masalah keamanan nasional dengan aspirasi masyarakat Papua, yang menginginkan pengakuan yang lebih besar atas hak-hak mereka sebagai komponen penting Indonesia.

Konflik Irian Barat, yang merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia, menunjukkan bagaimana tujuan politik dapat

dicapai melalui kombinasi kekuatan militer dan diplomasi. Selain masalah teritorial, konflik ini juga menyentuh sejumlah masalah ekonomi, politik, dan sosial yang terus memengaruhi hubungan antara daerah dan pusat hingga saat ini. Papua diterima menjadi bagian dari Indonesia setelah konflik ini diselesaikan melalui Perjanjian New York dan referendum Pepera. Namun, berbagai masalah yang muncul setelah integrasi menunjukkan bahwa pengelolaan keberagaman dan keadilan tetap menjadi tugas penting bagi Indonesia (Marshanda, 2023). Uni Soviet dan pelaku internasional lainnya yang terlibat dalam penyelesaian konflik, menunjukkan betapa pentingnya geopolitik global terhadap konflik lokal Perang Dingin di negara-negara berkembang. Penyelesaian konflik Papua di masa mendatang akan memerlukan strategi yang lebih inklusif yang melibatkan penduduk lokal sebagai pelaku penting dalam membentuk nasib wilayah mereka sendiri, selain pemerintah nasional dan elit politik.

C. Strategi di Balik Perundingan New York

Salah satu momen krusial dalam sejarah diplomasi Indonesia terjadi pada perundingan di New York tahun 1962. Perumusan strategi multifaset oleh pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, yang menggabungkan diplomasi internasional, aliansi strategis, dan tekanan militer melalui operasi terencana, sangat penting bagi keberhasilan Indonesia dalam perundingan tersebut. Taktik ini menunjukkan kemampuan Indonesia untuk memanipulasi dinamika politik dunia selama Perang Dingin, selain menjadi sarana praktis untuk memberikan tekanan kepada Belanda. Salah satu masalah yang menonjol dalam hubungan Indonesia-Belanda sejak deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah wilayah Irian Barat atau Papua. Kolonialisme Belanda di sebagian besar wilayah Indonesia berakhir pada tahun 1949 ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia selama Konferensi Meja Bundar (KMB), meskipun Irian Barat tetap berada di bawah kekuasaan Belanda. Pada awal tahun 1960-an, diplomasi bersenjata dan diplomasi meja perundingan mencapai puncaknya dalam pertikaian yang telah berlangsung lama

mengenai status Irian Barat dalam hubungan bilateral antara kedua negara.

Menurut Zahidi & Pradana (2020), teknik kolonial Belanda yang bertujuan untuk mempertahankan kendali mereka di wilayah ini merupakan alasan di balik status Irian Barat yang belum dialihkan oleh Belanda. Bersamaan dengan kekayaan sumber daya alam di wilayah tersebut, Indonesia menjadi semakin menyadari manfaat geopolitik dan ekonomi dari dominasi di Irian Barat, di samping alasan nasionalistis dan terkait kedaulatan. Indonesia menggunakan strategi multifaset yang mencakup kekuatan militer dan diplomasi dalam hubungannya dengan Belanda. Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) yang dicanangkan Presiden Soekarno pada tahun 1961 merupakan salah satu inisiatif utama dalam strategi Indonesia. Jika upaya diplomatik tidak membuahkan hasil, misi ini berupaya mempercepat pengembalian Irian Barat ke Indonesia melalui cara bersenjata. Jenderal A. Nasution mengawasi Trikora, yang didukung oleh pasukan bersenjata yang diperoleh dari Uni Soviet. Dengan bantuan dukungan ini, Indonesia mampu memberikan tekanan militer yang lebih besar kepada Belanda dan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia siap menggunakan kekuatan ketika dibutuhkan.

Menurut Nurhikmi et al. (2020), Indonesia memperoleh banyak manfaat dari bantuan militer Soviet dalam bentuk persenjataan canggih, seperti jet tempur, kapal perang, dan pelatihan militer. Dengan dukungan ini, Indonesia memperoleh keunggulan taktis jika terjadi potensi konflik dengan Belanda. Namun, tujuan utama operasi militer ini adalah menggunakan diplomasi untuk memaksa Belanda menyerah daripada menyatakan perang terbuka. Oleh karena itu, langkah-langkah diplomatik yang hati-hati diambil untuk melengkapi rencana militer ini. Indonesia memanfaatkan arena global, seperti konferensi PBB untuk menarik negara-negara anggota. Indonesia secara agresif mendorong negara-negara nonblok dan negara-negara dunia ketiga untuk mendukung klaim Indonesia atas Irian Barat di bawah Menteri Luar Negeri Subandrio. Subandrio memanfaatkan kerusuhan politik era Perang Dingin di seluruh dunia untuk menarik negara-negara yang juga memerangi

kolonialisme. Menurut Lala et al. (2022), keanggotaan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok terbukti sangat bermanfaat dalam menggalang dukungan dari negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang memiliki pengalaman kolonial yang serupa. Di PBB, Indonesia berulang kali menggarisbawahi pentingnya dekolonisasi Irian Barat sebagai komponen upaya dunia untuk memberantas kolonialisme sebuah topik yang sangat relevan bagi banyak negara saat itu. Dengan bantuan negara-negara non-blok, kedudukan Indonesia di forum internasional semakin ditingkatkan, dan Belanda berada di bawah tekanan politik.

Membentuk aliansi strategis dengan negara-negara besar di dunia, khususnya AS dan Uni Soviet, merupakan komponen utama pendekatan negosiasi Indonesia di New York. Kedua negara ini terlibat dalam persaingan geopolitik yang sengit di sebagian besar dunia, termasuk Asia Tenggara selama Perang Dingin. Berkat kapasitasnya dalam diplomasi dua arah, Indonesia mampu memanfaatkan persaingan ini untuk keuntungannya sendiri. Nurhikmi et al. (2020) menuliskan bahwa Uni Soviet memberikan Indonesia persenjataan senilai hampir setengah miliar dolar, termasuk kapal perang, pesawat tempur, dan sistem pertahanan udara, yang memberikan Indonesia kekuatan militer yang cukup untuk menekan Belanda agar terlibat dalam perundingan. Bantuan militer Uni Soviet kepada Indonesia tidak hanya dimotivasi oleh alasan ideologis, tetapi juga oleh keinginan untuk meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Namun Indonesia juga memahami bahwa, untuk mencapai kesepakatan diplomatik yang dianggap asli oleh masyarakat internasional, dukungan Amerika Serikat diperlukan. Pada akhirnya, AS memutuskan untuk campur tangan sebagai mediator dalam perselisihan ini karena khawatir akan pengaruh Uni Soviet yang semakin besar di Asia Tenggara. Wihardyantje et al. (2018), menegaskan bahwa keikutsertaan AS dalam perundingan New York tidak dapat dilepaskan dari keinginannya untuk menjaga perdamaian regional dan menghindari konfrontasi yang lebih serius antara Belanda dan Indonesia. Amerika Serikat berhasil memediasi perundingan yang berujung pada Perjanjian

New York pada bulan Agustus 1962 melalui duta besar Ellsworth Bunker.

Kecerdasan taktis Sukarno dan tim diplomatiknya dalam memanfaatkan persaingan geopolitik untuk mencapai tujuan nasional ditunjukkan dalam kebijakan diplomatik Indonesia yang bersekutu dengan kedua negara adikuasa ini. Sukarno memahami bahwa jika kedua negara adidaya ini mendukung Indonesia dalam perundingan, hal itu akan meningkatkan posisi negosiasi Indonesia dan mencegah Belanda mencari dukungan dari blok Barat yang lebih besar. Komponen penting dari strategi diplomatik Indonesia adalah Gerakan Non-Blok. Sukarno, salah satu pendiri gerakan tersebut, memperjuangkan masalah Irian Barat dengan menggunakan posisi Indonesia sebagai pemimpin di antara negara-negara dunia ketiga. Banyak negara yang menjadi anggota Gerakan Non-Blok berbagi persatuan Indonesia yang kuat saat mereka berjuang melawan kolonialisme untuk kebebasan mereka sendiri. Husin (2022), menjelaskan bahwa Indonesia efektif dalam memengaruhi opini global yang mendukung klaimnya atas Irian Barat dengan menggunakan platform internasional seperti Majelis Umum PBB dan Konferensi Asia-Afrika. Indonesia telah menjelaskan berkali-kali bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk kedaulatan nasional tetapi juga untuk berpartisipasi dalam gerakan dunia untuk mengakhiri kolonialisme. Negara-negara dunia ketiga dengan pengalaman yang sebanding dengan cepat memberikan dukungan mereka terhadap retorika ini.

Selain itu, Indonesia memanfaatkan dukungan negara-negara Asia dan Afrika untuk menjauhkan diri dari Belanda di forum-forum global. Bupu & Sumarjiana (2021), menjelaskan bahwa taktik ini sangat efektif dalam melemahkan posisi diplomatik Belanda, sehingga tidak ada pilihan lain selain menerima mediasi internasional yang difasilitasi AS. Selama perundingan di New York, Menteri Luar Negeri Subandrio berperan penting dalam merumuskan pendekatan diplomatik Indonesia. Sebagai diplomat berpengalaman, Subandrio menyadari betapa pentingnya mengendalikan tekanan diplomatik dan militer saat terlibat dalam diskusi internasional. Subandrio

menggunakan taktik diplomatik yang cerdas, dengan menekankan perlunya menegakkan posisi Indonesia sebagai mitra yang berdedikasi pada penyelesaian damai tetapi tetap menunjukkan kesediaan untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan. Subandrio juga membantu dalam pengembangan hubungan antara Soekarno dan Krushchev, yang akhirnya mengarah pada aliansi militer dengan Uni Soviet (Subandi, 2009). Untuk memastikan bahwa saluran diplomatik tetap terbuka, Subandrio juga terus berkomunikasi dengan AS melalui Bunker pada saat yang sama. Dengan strategi ini, Indonesia mampu mempertahankan tekanan diplomatik terhadap Belanda tanpa takut akan keterlibatan militer blok Barat..

Untuk menarik simpati negara-negara berkembang yang berjuang untuk kemerdekaan dari penjajahan, Subandrio juga terlibat dalam Gerakan Non-Blok dan negara-negara dunia ketiga. Ia beberapa kali mencoba membuat narasi yang menyatakan bahwa perjuangan Indonesia di Irian Barat merupakan bagian dari perjuangan dekolonisasi global. Berkat kombinasi tekanan militer dari Operasi Trikora dan tekanan diplomatik dari partisipasi aktif Indonesia di forum internasional dan Gerakan Non-Blok, Indonesia mampu membangun tekanan yang cukup melalui pendekatan diplomatik dan militer untuk memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Belanda terpaksa mempertimbangkan untuk menyerahkan Irian Barat sebagai akibat dari keterasingan mereka dari dunia luar dan ketidakmampuan mereka untuk mengalahkan kekuatan militer Indonesia, yang didukung oleh Uni Soviet. Amerika Serikat akan menjadi mediator utama dalam negosiasi tersebut pada tahap selanjutnya. Amerika Serikat berkepentingan untuk menjaga stabilitas Asia Tenggara karena kekhawatiran bahwa meningkatnya permusuhan antara Indonesia dan Belanda dapat menyebabkan konflik yang lebih besar yang melibatkan Uni Soviet. Pemain penting dalam mediasi ini adalah diplomat senior AS Ellsworth Bunker. Bunker menyadari perlunya menjaga kepentingan Belanda dan Indonesia tetap terkendali dan memastikan bahwa negosiasi dapat menghasilkan

kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Menurut Wihardiyantie et al. (2018), Perjanjian New York ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 sebagai konsekuensi dari mediasi AS. Pengalihan Irian Barat dari Belanda ke PBB, yang kemudian menyerahkannya kepada Indonesia, disetujui berdasarkan perjanjian ini. Meskipun beberapa klausul perjanjian tersebut menuai kritik terutama yang berkaitan dengan Pepera 1969 namun hal itu tetap dianggap sebagai kemenangan diplomatik yang signifikan bagi Indonesia. Dengan menggunakan hubungan internasional dengan negara-negara besar dan gerakan global selain kekuatan militer sebagai alat negosiasi, pendekatan Indonesia terhadap negosiasi di New York merupakan contoh diplomasi yang terencana dengan baik dan memiliki banyak sisi. Dengan bersekutu dengan Uni Soviet sebagai sekutu militer dan Amerika Serikat sebagai perantara diplomatik, Indonesia berhasil menekan Belanda untuk menyerahkan Irian Barat, dan partisipasi aktifnya dalam Gerakan Non-Blok semakin memperkuat posisi diplomatik Indonesia di kancah internasional, yang pada akhirnya mengisolasi Belanda.

Salah satu pencapaian terbesar diplomasi Indonesia sejak kemerdekaan adalah pendekatan negara tersebut dalam Perundingan New York, yang didasarkan pada kombinasi kekuatan militer yang diperoleh dari Uni Soviet, diplomasi internasional melalui Gerakan Non-Blok, dan mediasi langsung AS. Dengan pencapaian ini, Indonesia mampu memantapkan posisinya sebagai negara merdeka yang dapat memengaruhi geopolitik global, terutama dalam konteks Perang Dingin. Irian Barat dikembalikan ke Indonesia, dan legitimasi internasional negara tersebut sebagai pesaing dalam politik dunia diperkuat oleh kemenangan ini, yang dicapai melalui strategi yang dipikirkan secara matang dan pelaksanaan yang cermat yang menunjukkan bahwa Indonesia sedang berperang secara diplomatik sekaligus militer dan memanfaatkan setiap peluang untuk menang.

D. Perundingan New York, 1962

Upaya Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Belanda mengenai wilayah Irian

Barat (sekarang Papua) berakhir pada perundingan New York tahun 1962. Konflik ini bermula setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya tahun 1945 dan Belanda menolak menyerahkan Irian Barat, meskipun mereka telah menerima pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Kenyataan bahwa Irian Barat masih dikuasai Belanda menyebabkan permusuhan yang berkepanjangan antara kedua negara. Berbicara tentang Irian Barat, Presiden Soekarno bahkan menyatakan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian penting dari Indonesia. Pada tahun 1950-an, Soekarno menyatakan, "Irian Barat adalah bagian dari tubuh kita yang harus kita rebut kembali," yang menyoroti pentingnya wilayah tersebut bagi integrasi nasional Indonesia (Bupu & Sumarjiana, 2021). Selain itu, dari sudut pandang internasional, perselisihan ini mungkin telah menyebabkan konflik geopolitik yang lebih intens, terutama selama Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet, dua negara adikuasa di dunia. Di bawah arahan Soekarno, Indonesia mampu memanfaatkan keadaan global ini untuk mendapatkan dukungan bagi perjuangannya.

Sebelum Amerika Serikat campur tangan sebagai mediator, diplomasi intensif yang dilakukan kedua belah pihak selama bertahun-tahun gagal menghasilkan kompromi yang dapat dilaksanakan. Amerika mendukung penyelesaian konflik secara damai yang akan memperbaiki hubungan dengan Indonesia karena mereka menyadari risiko yang dapat ditimbulkan konflik tersebut jika Uni Soviet semakin terlibat. Hal ini membuka jalan bagi negosiasi antara negosiator dari Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat yang akan berlangsung di New York pada pertengahan tahun 1962. Agar dapat menang dalam perundingan di New York, Indonesia memilih pendekatan tekanan diplomatik dan militer. Disebut sebagai "Diplomasi Ganda", taktik ini menggunakan tindakan militer sebagai sarana untuk menekan Belanda agar mau berunding, sementara diplomasi dilakukan di forum internasional, seperti PBB, untuk menarik perhatian negara lain (Husin, 2022). Pada bulan Desember 1961, operasi militer Indonesia mencapai puncaknya dalam Operasi Trikora. Operasi ini tidak memberikan keberhasilan

militer yang besar, tetapi memberikan tekanan psikologis yang besar bagi Belanda. Mereka menyadari bahwa mereka siap bertempur untuk merebut Irian Barat meskipun sumber daya Indonesia sangat terbatas. Indonesia secara aktif mendorong dukungan internasional pada saat yang sama, khususnya dari negara-negara nonblok.

Selain itu, Soekarno berhasil menjalin kemitraan strategis dengan Uni Soviet, yang memberikan dukungan logistik dan militer kepada Indonesia. Uni Soviet siap memberikan dukungan militer berupa peralatan dan pelatihan karena menganggap Indonesia sebagai negara krusial dalam persaingan geopolitik di Asia Tenggara (Nurhikmi et al., 2020). Meskipun tidak dikerahkan dalam konflik tersebut, dukungan ini meningkatkan posisi negosiasi Indonesia dengan negara lain, khususnya AS, yang khawatir dengan dominasi Soviet di wilayah tersebut. Dengan menggunakan teknik diplomatik yang cerdas, diplomat Indonesia seperti Soebandrio berperan penting dalam negosiasi tersebut. Selain menjanjikan kepada Amerika bahwa resolusi damai akan menghentikan keterlibatan Soviet di masa mendatang, Soebandrio dan timnya menggarisbawahi bahwa Indonesia siap untuk melanjutkan konflik jika diskusi gagal. Dalam memoarnya, Soebandrio menyatakan, "Kami menggunakan semua cara yang kami miliki, baik kekuatan militer maupun diplomasi, untuk mencapai tujuan kami" (Subandrio, 1964).

Sepanjang diskusi di New York, Amerika Serikat merupakan mediator yang penting. Mereka khawatir jika permusuhan terus berlanjut, Indonesia akan menjadi semakin penting secara strategis bagi Uni Soviet, yang membahayakan kepentingan Barat di Asia Tenggara. Ellsworth Bunker, seorang diplomat senior untuk Amerika Serikat, mengusulkan resolusi damai kepada kedua belah pihak dalam upaya untuk menghentikan hal ini. "Rencana Bunker" yang disusun oleh Bunker menjadi dasar kesepakatan antara Belanda dan Indonesia. Menurut rencana tersebut, Indonesia pada akhirnya akan mengambil alih kewenangan administratif Irian Barat dari Belanda dan menyerahkannya kepada PBB untuk jangka waktu terbatas. Secara paralel, referendum akan diadakan di wilayah tersebut

untuk memastikan apakah warga Irian Barat ingin tetap merdeka atau bergabung dengan Indonesia (Zahidi & Pradana, 2020). Rencana Bunker merupakan kompromi yang memuaskan kedua belah pihak. Rencana ini memberi Indonesia keyakinan bahwa mereka akhirnya akan mendapatkan kembali Irian Barat. Rencana ini memberi Belanda cara yang bermartabat untuk keluar dari perang tanpa harus menyerah kepada Indonesia secara langsung. Amerika Serikat kemudian memastikan bahwa kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan secara damai dengan dukungan PBB.

Banyak isu penting yang dibahas selama diskusi. Salah satu isu adalah nasib politik Irian Barat setelah dipindahkan dari Belanda ke Indonesia. Sementara Indonesia mengklaim bahwa referendum hanya formalitas karena mereka yakin bahwa mayoritas pemilih Irian Barat akan memilih untuk bergabung dengan Indonesia, Belanda terlebih dahulu menginginkan referendum yang dijamin dalam Rencana Bunker diadakan di bawah pengawasan ketat PBB. Hak-hak penduduk asli Irian Barat menjadi pokok pertikaian lainnya. Sementara Indonesia bersikeras memperlakukan penduduk Irian Barat setara dengan warga negara Indonesia lainnya, Belanda ingin menjamin perlindungan hak-hak politik dan ekonomi penduduk. Hal ini menimbulkan ketegangan selama negosiasi, tetapi pada akhirnya diputuskan bahwa PBB akan mengawasi proses transisi untuk menjamin hak-hak penduduk asli (Juliarni & Zed, 2020). Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962, perwakilan Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York, yang menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kendali administratif Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Oktober 1962, PBB kemudian akan mempertahankan kendali atas wilayah tersebut selama enam bulan sebelum menyerahkannya kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963; setelah penyerahan tersebut, referendum yang dikenal sebagai "Tindakan Pemilihan Bebas" (Pepera) akan diadakan pada tahun 1969 untuk menentukan status akhir Irian Barat.

Dengan menggunakan kekuatan militer dan diplomasi, Indonesia mampu mencapai tujuannya, dan kesepakatan itu dipandang

sebagai kemenangan yang signifikan. Pada saat itu, kesepakatan itu menandai berakhirnya kolonialisme di wilayah tersebut dan pertikaian antara Indonesia dan Belanda, meskipun referendum Pepera kemudian menimbulkan kontroversi atas tuduhan manipulasi (Marshanda, 2023). Masyarakat dunia dan Indonesia sangat terpengaruh oleh perundingan di New York. Perjanjian ini menegaskan status Indonesia sebagai negara berdaulat dengan otoritas penuh atas seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Posisi politik Presiden Soekarno semakin diperkuat dengan pengembalian Irian Barat ke Indonesia. Ia menafsirkan kemenangan ini sebagai bukti keberhasilan pendekatannya dalam menghadapi kekuatan kolonial (Wihardiyantie et al., 2018). Kesepakatan ini menunjukkan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan pertikaian dalam skala global. Selain itu, keikutsertaan Amerika Serikat sebagai mediator menunjukkan bahwa, meskipun terlibat dalam Perang Dingin, Amerika Serikat masih mampu memediasi pertikaian yang tidak terkait dengan pertikaian ideologi global. Kesepakatan ini juga menekankan betapa pentingnya bagi PBB untuk mengawasi transisi damai di wilayah rawan konflik (Lala et al., 2022).

Meskipun demikian, beberapa warga Irian Barat tidak senang dengan dampak jangka panjang dari diskusi tersebut karena mereka yakin bahwa mereka tidak sepenuhnya diikutsertakan dalam referendum Pepera atau proses negosiasi. Fakta bahwa masih ada kekerasan di Papua, seperti yang ditunjukkan oleh pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), menunjukkan bahwa isu-isu yang diangkat oleh Perjanjian New York belum sepenuhnya ditangani (Korwa, 2013). Contoh terkenal tentang bagaimana diplomasi, yang dipadukan dengan taktik militer dan aliansi global, dapat menghasilkan resolusi damai untuk permusuhan yang berlarut-larut adalah diskusi New York, kesepakatan ini menjadi bukti efektivitas diplomasi bagi Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini tentang "Diplomasi Indonesia dalam Konflik Irian Barat: Strategi di Balik Perundingan New York 1962"

merefleksikan dinamika diplomasi Indonesia dalam penyelesaian konflik Irian Barat, memadukan pendekatan diplomasi, kekuatan militer, dan aliansi strategis yang sukses membawa Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia. Artikel ini menekankan pentingnya diplomasi sebagai senjata utama dalam resolusi konflik ini. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, memanfaatkan konstelasi geopolitik Perang Dingin dengan cerdas, memanfaatkan ketegangan antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, untuk mencapai tujuan nasional. Diplomat seperti Soebandrio memainkan peran sentral dalam membangun hubungan diplomatik yang erat dengan Uni Soviet sekaligus menjaga jalur negosiasi dengan Amerika Serikat, yang berperan penting sebagai mediator dalam perundingan. Melalui Rencana Bunker, mediasi Amerika Serikat menghasilkan solusi damai yang akhirnya memaksa Belanda menyerahkan kendali administratif Irian Barat kepada PBB sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia.

Selain itu, artikel ini menunjukkan bagaimana Indonesia menggunakan kombinasi diplomasi multilateral di forum internasional seperti PBB dan Gerakan Non-Blok untuk membangun dukungan global bagi integrasi Irian Barat. Pendekatan ini berhasil mengisolasi Belanda di kancah diplomatik internasional, memaksa mereka untuk menerima mediasi. Di sisi lain, ancaman nyata dari Trikora dan dukungan militer dari Uni Soviet memberikan tekanan yang signifikan kepada Belanda, membuat opsi diplomasi menjadi jalan keluar yang lebih disukai. Namun, kesepakatan yang dicapai melalui Perjanjian New York, meskipun dianggap sebagai kemenangan diplomasi Indonesia, tetap menuai kontroversi. Referendum Pepera yang diadakan pada tahun 1969 untuk menentukan nasib Irian Barat dinilai tidak mencerminkan keinginan rakyat Papua secara bebas, menimbulkan protes hingga hari ini. Meskipun demikian, kembalinya Irian Barat ke pangkuan Indonesia melalui jalur diplomasi tanpa harus melalui perang besar-besaran adalah pencapaian yang luar biasa dan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam kancah internasional, khususnya di tengah-

tengah negara berkembang dan Gerakan Non-Blok.

Keberhasilan Indonesia dalam Perundingan New York juga menunjukkan kecerdikan Sukarno dalam memainkan peran diplomasi di panggung global. Dengan menggunakan bahasa anti-kolonial yang kuat, Sukarno mampu menarik simpati dari banyak negara yang masih dalam proses dekolonisasi. Selain itu, dukungan dari Uni Soviet, baik dalam bentuk militer maupun politik, memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi. Perjanjian ini tidak hanya menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda, tetapi juga menciptakan momentum politik yang signifikan bagi Sukarno di dalam negeri, memperkuat legitimasinya sebagai pemimpin nasional yang mampu menyatukan seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Pada akhirnya, meskipun ada perdebatan yang berlanjut mengenai implementasi Pepera dan hubungan Indonesia dengan Papua hingga hari ini, Perundingan New York tetap merupakan salah satu pencapaian diplomasi terbesar dalam sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan.

Kesimpulannya secara keseluruhan artikel ini menekankan bahwa resolusi konflik Irian Barat melalui Perundingan New York adalah hasil dari kombinasi antara diplomasi cerdas, tekanan militer, dan dukungan internasional yang kuat. Perundingan ini bukan hanya tentang klaim teritorial, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia memainkan peran aktif dalam dinamika global, menghadapi tantangan kolonialisme, dan menegaskan kedaulatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. B. S. (n.d.). *KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA TERHADAP INDONESIA PADA MASA PERANG DINGIN 1945-1958*.
- Bupu, T. N., & Sumarjiana, I. K. L. (2021). Operasi Trikora Sebagai Upaya Mengembalikan Irian Barat Ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 11(1), 9-19.
- Harsono, M. I., Aliabbas, A., & Sahela, K. Z. (2023). Keterlibatan State dan Non State Actor dalam Akar Permasalahan Konflik Papua. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3995-4006.
- Husin, H. (2022). Konflik Indonesia-Belanda: Upaya Mengembalikan Irian Jaya Kedalam Pangkuan Ibu Pertiwi. *Wiksa*, 1(1). <https://proceeding.unindra.ac.id/index.php/wiksa/article/viewFile/5895/1507>
- Indrayani, I., Umar, H., & Mellaz, A. (2020). Indonesia's Foreign Policy During Soekarno Era 1945-1965: (Orientation Shift from Diplomacy to Confrontation). *Journal of Social Political Sciences JSPS*, 1(3), 218-231.
- Juliarni, E., & Zed, M. (2020). Sejarah Pemikiran Diplomatik: Konflik Indonesia-Belanda Pada Kmb Dan Isu Yang Belum Terselesaikan. *Jurnal Kronologi*, 1(2), 12-26. <https://doi.org/10.24036/jk.v1i2.8>
- Korwa, R. (2013). Proses Integrasi Irian Barat Ke Dalam Nkri. *Jurnal Politico*, 2(1), 1-9.
- Kurnia, D. D., & Miftahuddin, M. (2019). PERAN GERWANI DALAM TRI KOMANDO RAKYAT (TRIKORA) 1961-1963. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 10(2).
- Lala, E. P. R., Tamon, M., & Umbase, R. (2022). Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif Indonesia Pada Masa Orde Lama. *Jurnal Pendidikan Sejarah ...*, 2(2). <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/pendidikan-sejarah/article/view/5722%0Ahttps://ejournal.unima.ac.id/index.php/pendidikan-sejarah/article/download/5722/2744>
- Leirissa, R. Z. (1992). *Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai
- Mangkusubroto, M. I. (2023). Diplomasi Tentara Nasional Indonesia Era Presiden Soekarno. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2491-2496.
- Marshanda, W. (2023). Diplomasi, Konflik, Dan Kemerdekaan: Pembebasan Irian Barat (1949-1962). *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(4), 1-11. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.134>
- McMullen, C. J. (1981). Mediation of the West New Guinea dispute, 1962: a case study. (No Title).
- Nurhikmi, D., Thohir, A., & Samsudin. (2020). Peran Abdul Haris Nasution dalam Pembebasan Irian Barat (1957-1962).

- Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 4(1), 177–200.
<https://doi.org/10.15575/hm.v4i1.9194>
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Penerbit Serambi.
- Rieuwpassa, J. P. (2017). *Peran Diplomasi Ekonomi Indonesia Di Forum G20 Dalam Pemenuhan Kepentingan Nasional*. Perpustakaan.
- Saltford, J. (2003). *The United Nations and the Indonesian takeover of West Papua, 1962-1969: the anatomy of betrayal*. Routledge.
- Subandi, A. Y. (2009). *Daya Ikat Persetujuan New York (New York Agreement) 1969 Antara Negara Republik Indonesia Dengan Kerajaan Belanda Mengenai Irian Barat Berdasarkan Hukum Internasional*. Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Subandrio. (1964). *Indonesia's foreign policy*. Gouvernement de la République d'Indonésie.
https://books.google.co.id/books?id=_OU-AAAAIAAJ
- Susetyo, B. (2018). *Strategi Diplomasi Indonesia Dalam*.
- Susetyo, B., & Ravico. (2020). *Strategi Diplomasi Indonesia dalam Pembebasan Papua Tahun 1949-1963*. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2(1), 112–126.
<https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i1.14>
- Wardaya, B. T. (2008). *Indonesia Melawan Amerika Konflik PD 1953-1963*. Galangpress Publisher.
- Widjojo, M. S., Elizabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2010). *Papua road map: Negotiating the past, improving the present, and securing the future*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wihardyantie, F. S., Darmawan, W., Santosa, A. B., Barat, K. I., Bundar, K. M., York, P. N., & Middleburg, P. (2018). *Feronika Sryudha Wihardyantie, Wawan Darmawan, dan Ayi Budi Santosa Keterlibatan Amerika Serikat dalam Penyelesaian Konflik Irian Barat 1960-1963*. II(1), 15–20.
- Yumetri Abidin, Y. (2019). *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia*. Lembaga Penerbitan UNAS.
- Zahidi, M. S., & Pradana, H. A. (2020). *Pola Relasi Hukum Internasional Dan Negara Pada Perundingan Masalah Papua Barat Tahun 1950- 1962*. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 5(1), 81.
<https://doi.org/10.21111/dauliyah.v5i1.4275>

